

**PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENYELENGGARA SUB URUSAN KEBAKARAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si)**

Pada

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Oleh:

**AHMET VAHLEVI
NIM: 07012682327019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Penguatan Kelembagaan Penyelenggara
Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan

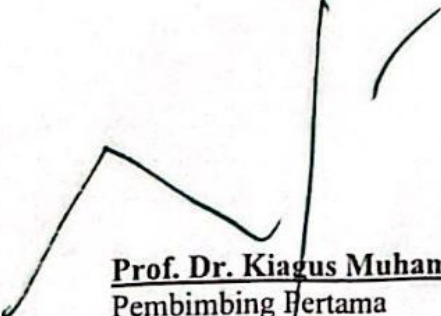
Nama Mahasiswa : AHMET VAHLEVI

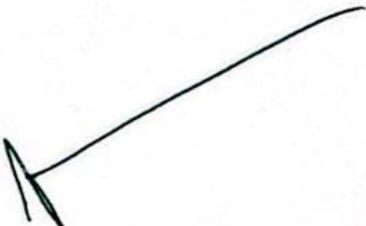
NIM : 07012682327019

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
Pembimbing Pertama


Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan


Nama Mahasiswa : Ahmet Vahlevi

NIM : 07012682327019

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 20 November 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si	Ketua	
2	Dr. Andries Lianardo, S.IP., M.Si.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Sriati, M.S.	Anggota	
4	Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM	Anggota	
5	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Anggota	

Palembang, November 2024
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmet Vahlevi
NIM : 07012682327019
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA SUB URUSAN
KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : November 2024
Yang Menyatakan,



Ahmet Vahlevi
NIM. 07012682327019

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmet Vahlevi
NIM : 07012682327019
Tempat / Tanggal lahir : Banyuasin, 12 Desember 1993
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub
Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Dan
Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera
Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, November 2024
Yang Menyatakan,



Ahmet Vahlevi
NIM. 07012682327019

ABSTRAK

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA SUB URUSAN KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; dibimbing oleh Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si dan Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penguatan Kelembagaan Penyelenggara dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode analisis menggunakan Software Atlas.ti. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi kepemimpinan visioner, yang mampu mengarahkan organisasi menuju pencapaian jangka panjang, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, yang meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. Rekrutmen yang berbasis kompetensi dan transparan juga memperkuat kualitas sumber daya manusia. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui REDKAR membantu memperluas sosialisasi dan kesiapsiagaan di tingkat lokal. Beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah kabupaten/kota, terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan pengadaan peralatan, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional. Kurangnya implementasi sistem informasi terintegrasi, baik untuk pelaporan maupun koordinasi antar instansi, juga menghambat respons cepat terhadap kejadian kebakaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran di Sumatera Selatan membutuhkan strategi yang komprehensif, pengembangan infrastruktur dan teknologi hingga peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi lintas instansi. Dengan penguatan kelembagaan yang terarah, diharapkan kemampuan respons terhadap kebakaran dapat ditingkatkan, meminimalisir kerugian, serta melindungi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: Kebakaran; Penanggulangan; Pencegahan; Penguatan Kelembagaan;
Kepustakaan: 48 (2005-2024)

ABSTRACT

INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF FIRE SUB-AFFAIRS ORGANIZERS IN EFFORTS TO PREVENT AND MANAGE FIRES IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

Scientific Writing in the form of Thesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; supervised by Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si and Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

This study aims to analyze the Institutional Strengthening of Fire Sub-Affairs Organizers and identify what factors are the obstacles and supporters in Strengthening the Institutional Strengthening of Fire Sub-Affairs Organizers in Fire Prevention and Handling Efforts in South Sumatra Province. This study uses a descriptive qualitative method with an analysis method using Atlas.ti Software. The supporting factors found include visionary leadership, which is able to direct the organization towards long-term achievements, as well as continuous education and training for officers, which improves technical and managerial competence. Competency-based and transparent recruitment also strengthens the quality of human resources. In addition, community involvement through REDKAR helps expand socialization and preparedness at the local level. Several inhibiting factors, such as limited facilities and infrastructure in a number of districts/cities, limited budgets for training and procurement of equipment, and less than optimal use of technology, which have an impact on operational efficiency and effectiveness. The lack of implementation of an integrated information system, both for reporting and coordination between agencies, also hinders a rapid response to fire incidents. The results of this study indicate that strengthening the institutional strengthening of fire sub-affairs organizers in South Sumatra requires a comprehensive strategy, infrastructure and technology development to increasing HR capacity and cross-agency collaboration. With targeted institutional strengthening, it is hoped that fire response capabilities can be improved, minimizing losses, and protecting communities and the environment.

*Keywords: Countermeasures; Fire; Prevention; Strengthening Institutional;
Bibliography: 48 (2005-2024)*

RINGKASAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA SUB URUSAN KEBAKARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; dibimbing oleh Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si dan Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

xx + 214 halaman, 36 gambar, 14 tabel, 18 lampiran

Tesis ini mengeksplorasi penguatan kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan utama untuk menganalisis efektivitas kelembagaan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja kelembagaan terkait. Konteks ini menjadi sangat penting mengingat tingginya kasus kebakaran di Sumatera Selatan, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah rawan kebakaran hutan. Kebakaran ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga mengancam lingkungan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan peninjauan dokumen, penelitian ini berfokus pada tiga institusi utama yang memiliki peran sentral dalam penanggulangan kebakaran, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih. Pemilihan ketiga wilayah ini didasarkan pada variasi dalam tingkat kelembagaan, dengan Kota Palembang memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel penting dalam penguatan kelembagaan, seperti kepemimpinan *visioner*, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, tata kelola yang efektif, serta pemanfaatan teknologi. Dengan landasan teori penguatan kelembagaan dari Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, penelitian ini menganalisis sebelas dimensi kelembagaan. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan langkah-langkah optimal untuk membangun organisasi yang lebih responsif dan efisien dalam menangani tantangan operasional dan darurat.

Penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang mendukung penguatan kelembagaan. Pertama, kepemimpinan *visioner* dianggap sangat penting dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dapat mengidentifikasi risiko kebakaran yang ada dan memobilisasi sumber daya untuk mengurangi dampak kebakaran tersebut. Program pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran membantu meningkatkan kompetensi teknis mereka dalam menangani kebakaran. Dalam hal rekrutmen, sistem yang berbasis kompetensi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa personel yang direkrut memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasional.

Peran serta masyarakat, terutama melalui Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), juga sangat signifikan. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan relawan

ini membantu dalam sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pencegahan kebakaran. Kolaborasi antarinstansi juga ditemukan sebagai faktor yang mendukung keberhasilan penanggulangan kebakaran. Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serta instansi terkait lainnya membantu mempercepat respons terhadap kejadian kebakaran.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi kinerja kelembagaan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pelaksanaan jabatan fungsional di beberapa wilayah, yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana juga menjadi kendala besar. Keterbatasan ini mengurangi kapasitas lembaga untuk merespons kebakaran dengan cepat dan efektif. Pos pemadam kebakaran yang kurang tersebar di wilayah-wilayah strategis mengakibatkan lambatnya respons ketika kebakaran terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil yang luas. Keterbatasan anggaran juga menghambat upaya peningkatan infrastruktur dan kapasitas operasional. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal juga menjadi penghambat signifikan. Teknologi seperti sistem deteksi dini kebakaran, penggunaan drone untuk memantau area yang luas, serta sistem informasi yang terintegrasi untuk pelaporan dan koordinasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran di Sumatera Selatan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi perlu terus dilakukan. Kedua, pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pengadaan infrastruktur dan peralatan pemadam kebakaran. Ketiga, kolaborasi antarinstansi perlu terus diperkuat. Keempat, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kebakaran di Sumatera Selatan memerlukan integrasi berbagai elemen, mulai dari SDM, struktur organisasi, teknologi, hingga infrastruktur yang memadai. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dapat meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi masyarakat dari risiko kebakaran dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kata Kunci : Kebakaran; Penanggulangan; Pencegahan; Penguatan Kelembagaan;
Kepustakaan : 48 (2005-2024)

SUMMARY

INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF FIRE SUB-AFFAIRS ORGANIZERS IN EFFORTS TO PREVENT AND MANAGE FIRES IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

Scientific Writing in the form of Thesis, November 2024

Ahmet Vahlevi; supervised by Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si and Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

xx + 214 pages, 36 images, 14 tables, 18 appendices

This thesis explores the institutional strengthening of fire sub-department organizers in South Sumatra Province with the main objective of analyzing the effectiveness of institutions in preventing and handling fires. This study also aims to identify various supporting and inhibiting factors that affect the performance of related institutions. This context is very important considering the high number of fire cases in South Sumatra, especially in densely populated areas and areas prone to forest fires. These fires not only threaten public safety but also threaten the wider environment.

This study was conducted using a descriptive qualitative approach. Through in-depth interviews, field observations, and document reviews, this study focused on three main institutions that have a central role in fire management, namely the South Sumatra Provincial Government, Palembang City, and Prabumulih City. The selection of these three areas was based on variations in institutional levels, with Palembang City having a higher level of readiness compared to other areas.

This study focuses on important variables in institutional strengthening, such as visionary leadership, human resource management, infrastructure development, effective governance, and utilization of technology. Based on the institutional strengthening theory of Dyah Mutiarin and Arif Zaenudin, this study analyzes eleven institutional dimensions. This approach helps in formulating optimal steps to build a more responsive and efficient organization in dealing with operational and emergency challenges.

This study found a number of factors that support institutional strengthening. First, visionary leadership is considered very important in directing the organization to achieve long-term goals. Leaders who have a clear vision can identify existing fire risks and mobilize resources to reduce the impact of fires. Training and certification programs for firefighters help improve their technical competence in handling fires. In terms of recruitment, a competency-based system also plays an important role in ensuring that recruited personnel have skills that match job demands, thereby increasing operational effectiveness.

The role of the community, especially through the Firefighter Volunteers (REDKAR), is also very significant. Communities who are active in volunteer activities help in the socialization and dissemination of information related to fire prevention. Collaboration between agencies was also found to be a factor that supports the success of fire management. Good coordination between provincial, district, and city governments and other related agencies helps accelerate the response to fire incidents.

However, this study also found a number of inhibiting factors that affect institutional performance. One of the main factors is the lack of implementation of functional positions in several regions, which hinders the improvement of the quality of human resources as a whole. Infrastructure and facilities limitations are also major obstacles. These limitations reduce the capacity of institutions to respond to fires quickly and effectively. Fire stations that are not spread across strategic areas result in slow responses when fires occur, especially in large remote areas. Budget limitations also hamper efforts to improve infrastructure and operational capacity. Suboptimal use of technology is also a significant obstacle. Technologies such as early fire detection systems, the use of drones to monitor large areas, and integrated information systems for reporting and coordination have not been utilized optimally.

Based on the research findings, the author provides a number of recommendations to strengthen the institutional organizers of the fire sub-department in South Sumatra. First, increasing human resource capacity through training and certification needs to be continued. Second, the government must increase the budget for the procurement of firefighting infrastructure and equipment. Third, collaboration between agencies needs to be continuously strengthened. Fourth, local governments must optimize integrated information systems to accelerate the reporting and decision-making process.

Overall, this study shows that strengthening institutions in fire management in South Sumatra requires the integration of various elements, ranging from human resources, organizational structure, technology, to adequate infrastructure. Only with a comprehensive approach can the fire sub-department organizing institution increase its effectiveness in protecting the community from the risk of fire and minimizing negative impacts on the environment.

*Keywords : Countermeasures; Fire; Prevention; Strengthening Institutional;
Bibliography : 48 (2005-2024)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan kepada saya serta keluarga dalam menyelesaikan tesis berjudul “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk meraih gelar Magister Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa perjalanan panjang yang penulis tempuh tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, dan doa. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pencapaian ini. Dengan itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Istri, orangtua dan keluarga. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan penulis sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untuk penulis, membesarkan dan mendidik penulis sampai mendapat gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bapak&Ibu sampai melihat penulis berhasil. Hiduplah lebih lama;
2. Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si;
4. Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si;
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si dan Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku dosen Pembimbing yang selalu memberikan kesempatan serta membimbing penulis untuk selalu belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang dapat menjadi bekal penulis kedepannya;
6. Ibu Prof. Dr. Sriati, M.S., Bapak Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM., dan Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini hingga bisa selesai dengan baik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu, memberi masukan, dan mengajarkan setiap ilmu yang diberikan selama dibangku perkuliahan;
8. Staff atau pegawai FISIP Universitas Sriwijaya baik Admin Jurusan Magister Administrasi Publik dan seluruh pegawai FISIP yang telah membantu selama mengikuti perkuliahan;
9. Semua teman-teman Magister Administrasi Publik Angkatan 2023 yang telah kebersamai dan saling memberikan dukungan dalam proses belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini pada
Kedua Orang Tuaku,
Istriku Aulia Utami Putri, & Anakku

*Mereka adalah inspirasi hidup saya yang setia mendampingi dan memberi inspirasi bagi tulisan dalam penelitian saya.
Karena kehadiran mereka, sebagai orang tua, istri, anak, sekaligus motivasi saya yang setia. Saya mampu belajar dan bekerja selama masa studi hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
Terucap rasa terima kasih dan sayang sebagai penghargaan sebesar-besarnya atas kesetiaan mereka disisi saya selama ini.*

AHMET VAHLEVI

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Ahmet Vahlevi, Lahir di Kabupaten Banyuasin Pada Tanggal 12 Desember 1993, Anak bungsu dari Empat bersaudara. Memiliki seorang Istri Bernama Aulia Utami Putri, dan memiliki anak pertama yang Bernama Ashraf Vahlevi. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 01 Tebing Abang pada Tahun 2006, menyelesaikan pada jenjang Menengah Pertama di SMPN 01 Rantau Bayur Pada Tahun 2009, menyelesaikan pada jenjang Menengah Atas di SMAN 01 Banyuasin III pada Tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Strata-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan lulus pada Tahun 2016. Penulis menjalani karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2020. Saat ini penulis bertugas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023 penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Strata-2 Pada Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, selama menempuh masa studi S-2 penulis telah menerbitkan satu artikel jurnal internasional *KnE Social Sciences*, dan satu artikel jurnalsinta 4. Penulis menyelesaikan masa Pendidikan selama 16 bulan dengan gelar M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN	viii
<i>SUMMARY</i>.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	144
2.1. Landasan Teori.....	144
2.2 Teori Yang Digunakan.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Konsep.....	40
3.3 Fokus Penelitian.....	41
3.4 Jenis Dan Sumber Data..	44
3.5 Informan Penelitian.....	44

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6.1. Wawancara.....	46
3.6.2. Dokumentasi.....	46
3.6.3. Observasi.....	46
3.7. Teknik Analisis Data.....	47
3.7.1. Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>).....	47
3.7.2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	47
3.7.3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusions Drawing</i>).....	48
3.7.4. Analisis Data Menggunakan Aplikasi Atlas.Ti.....	48
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	51
4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Selatan.....	51
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palembang.....	59
4.3 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih.....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
5.1 Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....	66
5.1.1 <i>Visionery Leadership</i>	66
5.1.2 Sumber Daya Manusia.....	89
5.1.3 Struktur.....	124
5.1.4 Infrastruktur.....	130
5.1.5 Anggaran.....	150
5.1.6 Budaya.....	155
5.1.7 Strategi.....	164
5.1.8 Desain Program.....	171
5.1.9 Teknologi.....	175
5.1.10 <i>Networking</i>	180
5.1.11 Lingkungan.....	193
5.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat.....	202
5.2.1 Faktor Pendukung.....	202
5.2.2 Faktor Penghambat.....	203
5.3 Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Di Sumatera Selatan...	204
BAB VI PENUTUP.....	207
6.1 Kesimpulan.....	207
6.2 Saran.....	208
6.2.1 Saran Teoritis.....	208
6.2.2 Saran Praktis.....	208
DAFTAR PUSTAKA.....	210
LAMPIRAN.....	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Kebakaran Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan.....	3
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3. Tehnik Analisis Data.....	48
Gambar 4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel.....	52
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.....	62
Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih.....	64
Gambar 7. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Memiliki pandangan ke masa depan.	72
Gambar 8. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Bertanggung jawab	78
Gambar 9. Pelaksanaan Apel harian di Damkar Kota Palembang.....	85
Gambar 10. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Komunikatif.....	87
Gambar 11. Pelatihan Pemadam 1 di Ciracas.....	95
Gambar 12. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Pendidikan dan Pelatihan.....	97
Gambar 13. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Rekrutmen.....	105
Gambar 14. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Kualitas SDM.....	111
Gambar 15. Anggota Redkar mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran pada masyarakat.....	119
Gambar 16. Gotong royong bersama masyarakat Kota Palembang oleh petugas pemadam kebakaran Kota Palembang.....	120
Gambar 17. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Peran Serta Masyarakat.....	122
Gambar 18. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Struktur Kelembagaan.....	128
Gambar 19. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.....	133
Gambar 20. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih.....	133
Gambar 21. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Pembangunan.....	135
Gambar 22. Unit Pemadam Kebakaran Kota Palembang.....	141
Gambar 23. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Sarana dan Prasarana.....	147
Gambar 24. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Kemampuan Keuangan Lokal.....	153
Gambar 25. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Gaya Manajemen.....	168
Gambar 26. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Karakteristik Organisasi.....	162

Gambar 27. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Strategi Inovasi.....	169
Gambar 28. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Perencanaan Program.....	174
Gambar 29. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Sistem Informasi Manajemen.....	179
Gambar 30. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Kolaborasi.....	185
Gambar 31. <i>Benchmarking</i> ke Surabaya.....	188
Gambar 32. <i>Benchmarking</i> ke Bandung.....	189
Gambar 33. Kebijakan tentang tidak melakukan kegiatan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran.....	190
Gambar 34. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep <i>Benchmarking</i>	191
Gambar 35. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Penilaian resiko Daerah rawan kebakaran.....	195
Gambar 36. Visualisasi Atlas.ti Sub Konsep Tindakan pengurangan Daerah rawan kebakaran.....	200

DAFTAR TABEL

Tabel 1. OPD penyelenggara Sub urusan kebakaran dan jumlah Pos Damkar.....	5
Tabel 2. Peralatan utama petugas pemadam kebakaran.....	25
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4. Fokus Penelitian	42
Tabel 5. Laporan Kegiatan Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran di Kota Prabumulih	81
Tabel 6. Data Jumlah SDM Damkar yang sudah sertifikasi Pemadam 1	92
Tabel 7. Data Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.....	102
Tabel 8. Data Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih.....	103
Tabel 9. Data Jumlah ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.....	103
Tabel 10. Data Tingkat Pendidikan PNS BPBD Kota Prabumulih.....	108
Tabel 11. Data Relawan Pemadam Kebakaran di Sumatera Selatan Tahun 2024.....	114
Tabel 12. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Kota Prabumulih.....	118
Tabel 13. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran di Sumatera Selatan Tahun 2023.....	139
Tabel 14. Sarana dan Prasarana OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran di Sumatera Selatan Tahun 2023	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....	215
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian.....	216
Lampiran 3. Halaman Pengesahan Seminar Proposal.....	219
Lampiran 4. Matrik Perbaikan Seminar Proposal.....	220
Lampiran 5. Halaman Pengesahan Seminar Hasil Penelitian.....	223
Lampiran 6. Matrik Perbaikan Seminar Hasil Penelitian.....	224
Lampiran 7. Halaman Pengesahan Ujian Tesis.....	226
Lampiran 8. Matrik Perbaikan Ujian Tesis.....	227
Lampiran 9. Matrik Triangulasi Data.....	229
Lampiran 10. Dokumentasi Lapangan.....	246
Lampiran 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	252
Lampiran 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.....	254
Lampiran 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.....	257
Lampiran 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.....	259
Lampiran 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.....	262
Lampiran 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar.....	266
Lampiran 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.....	270
Lampiran 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	274

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebakaran perumahan menimbulkan ancaman signifikan bagi masyarakat di Sumatera Selatan, Indonesia. (Maharani et al., 2022) (Wahyuni et al., 2020) (Sagala et al., 2016) (Juliafad & Andayono, 2021) permukiman perkotaan yang padat penduduk di kawasan ini dan infrastruktur pencegahan dan respon kebakaran yang tidak memadai membuatnya sangat rentan terhadap bencana ini (Sagala et al., 2016). Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengatasi tantangan ini sangat penting untuk melindungi kehidupan dan properti di Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu aspek kuncinya adalah meningkatkan kelembagaan dan pencegahan kebakaran. Mekanisme yang kuat diperlukan untuk memantau kejadian kebakaran, memahami akar penyebabnya, dan menerapkan strategi yang ditargetkan untuk mengurangnya (Horton et al., 2022) (Tacconi, 2016) (Syaufina, 2018). Pentingnya langkah-langkah pencegahan dan respons kebakaran yang efektif tidak dapat dilebih-lebihkan, karena kebakaran dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap kehidupan, properti, dan lingkungan (Saputro & Rahmawati, 2022) (Maharani et al., 2022). Dalam konteks Sumatera Selatan, penyelenggara sub urusan kebakaran memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

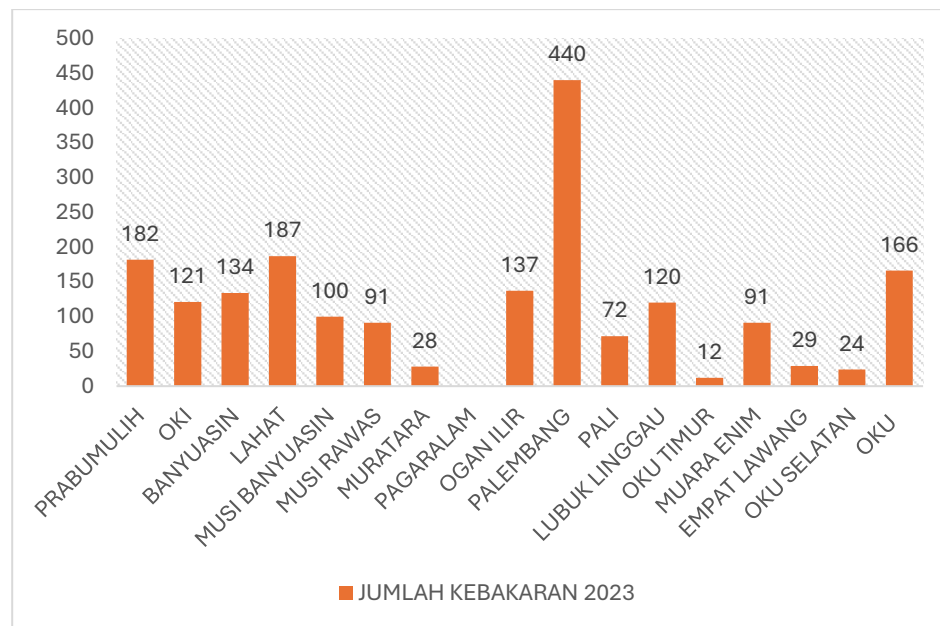
Salah satu aspek kunci dari penguatan tindakan kelembagaan adalah kebutuhan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem proteksi kebakaran saat ini. Bidang lain yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya pemadam kebakaran. Memastikan bahwa penyelenggara sub urusan kebakaran dilengkapi dengan personel, kendaraan, dan peralatan yang diperlukan, dan bahwa mereka dapat segera menanggapi insiden kebakaran, sangat penting dalam meminimalkan dampak bencana tersebut (Thompson, 2003). Selain itu, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan respons kebakaran yang jelas dan komprehensif dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi upaya penyelenggara sub urusan kebakaran. Penerapan sistem manajemen kebakaran yang mengadopsi pendekatan komprehensif untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan

respons kebakaran dapat berperan dalam memperkuat tindakan kelembagaan (Perilla et al., 2018). Ini dapat melibatkan pengembangan sistem pelaporan kebakaran dan manajemen data terpusat, yang dapat membantu dalam deteksi dini dan pencegahan kebakaran, serta optimalisasi alokasi sumber daya dan tanggap darurat (Sari, 2019). Penguatan aksi kelembagaan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Sumatera selatan memerlukan pendekatan multifaset (Sari, 2019), ini termasuk penilaian dan peningkatan sistem proteksi kebakaran yang ada, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, optimalisasi sumber daya pemadam kebakaran, dan pembentukan standar operasional prosedur yang kuat dan sistem manajemen kebakaran (Kodur et al., 2019). Selain itu rendahnya aktualisasi dalam penguatan kelembagaan akan menyebabkan rendahnya kinerja dari sebuah organisasi (Nawi, 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam berbagai sektor, termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa penanggulangan kebakaran merupakan bagian dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagai bagian dari urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayahnya masing-masing.

Masih tingginya jumlah kebakaran pemukiman di Provinsi Sumatera Selatan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan dan hal ini bukan hanya disebabkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tetapi terdapat beberapa permasalahan dari instansi terkait. Dengan angka kebakaran tertinggi di Palembang sebanyak 440 kejadian kebakaran selama tahun 2023 dan disusul Lahat dengan 187 kejadian kebakaran, Prabumulih sebanyak 182 kejadian kebakaran, OKU sebanyak 166 kejadian kebakaran, Ogan Ilir sebanyak 137 kejadian kebakaran, Banyuasin sebanyak 134 kejadian kebakaran, OKI sebanyak 121 kejadian kebakaran, Lubuk Linggau sebanyak 120 kejadian kebakaran, Musi Banyuasin sebanyak 100 kejadian kebakaran, Musi Rawas dan Muara Enim sebanyak 91 kejadian kebakaran,

Pematang Abab Lematang Ilir sebanyak 72 kejadian kebakaran, Empat Lawang sebanyak 29 kejadian kebakaran, Musi Rawas Utara sebanyak 28 kejadian kebakaran, OKU Selatan sebanyak 24 kejadian kebakaran dan terendah OKU Timur sebanyak 12 kejadian kebakaran sedangkan pagar alam belum merekap data terkait jumlah kebakaran di wilayah tersebut dan ini menjadi salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan kelembagaan. Seperti pada gambar 1. Jumlah kebakaran tahun 2023 di Sumatera Selatan berikut ini:



Sumber: Dokumen Bidang Pemetaan Kebakaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Gambar 1. Jumlah Kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Dengan data jumlah kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan yang masih cukup tinggi perlu adanya evaluasi tentang standar pelayanan minimal daerah kabupaten/kota tentang urusan kebakaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan Masyarakat/ relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan mutu pelayanan tersebut setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan belum memenuhi peraturan tersebut, berdasarkan data Tabel 1. OPD Penyelenggara sub urusan kebakaran masih terdapat ketimpangan jumlah pos dan juga masih ada OPD yang belum mandiri sehingga masih bergabung dengan OPD lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa penyelenggara pemadam kebakaran adalah dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dan penetapan Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota artinya sudah ada perhatian khusus oleh Pemerintah dalam penyelenggara sub kebakaran namun berdasarkan data Tabel 1. Menunjukkan bahwa dari 18 OPD penyelenggara sub urusan kebakaran yang ada di Sumatera Selatan masih terdapat 9 OPD yang masih bergabung yaitu Sumatera Selatan, Prabumulih, OKI, Banyuasin, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Pagar Alam sedangkan OPD yang sudah mandiri terdapat 9 OPD yaitu di Ogan Ilir, Palembang, PALI, Lubuk Linggau, OKU Timur, Muara Enim, Empat Lawang, OKUS dan OKU. Jika dibandingkan jumlah pos damkar OPD yang sudah mandiri dan yang masih bergabung terlihat terjadi ketimpangan jumlah Pos Damkar, dan pembentukan Pos damkar sendiri untuk dapat mencapai SPM dapat diukur dari luas wilayah dan jumlah kecamatan yang ada di kabuapten/kota di Sumatera Selatan. Berikut Tabel 1 Menunjukkan OPD penyelenggara Sub urusan kebakaran dan jumlah Pos damkar di Sumatera Selatan:

Tabel 1. Data OPD dan Pos Pemadam Kebakaran pada Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran di Sumatera Selatan Tahun 2023

NAMA OPD PENYELENGGARA SUB URUSAN KEBAKARAN	KABUPATEN/ KOTA	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDU K (JIWA)	JUMLAH KECAMATA N	JUMLAH POS DAMKAR
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel	PROV. SUMSEL	86.771,68	8.743.522	241	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar Kota Prabumulih	PRABUMULIH	447,31	200.673	6	1
Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kabupaten OKI	OKI	17.071,33	797.429	18	1
Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kabupaten Banyuasin	BANYUASIN	12.262,76	874.210	21	4
Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kabupaten Lahat	LAHAT	4.333,07	444.949	24	3
Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kabupaten Musi Banyuasin	MUSI BANYUASIN	14.550,79	644.386	15	8
Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kabupaten Musi Rawas	MUSI RAWAS	6.122,59	407.694	14	4
Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kabupaten Musi Rawas Utara	MURATARA	5.937,80	195.965	7	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar Kota Pagaralam	PAGARALAM	625,91	147.836	5	1
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir	OGAN ILIR	2.302,86	431.043	16	3
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang	PALEMBANG	352,51	1.706.371	18	9
Dinas Pencegahan Bahaya Kebakaran Kabupaten PALI	PALI	1.842,56	202.681	5	1
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Lubuklinggau	LUBUK LINGGAU	367,73	242.976	8	5
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten OKU Timur	OKU TIMUR	4.369,25	668.035	20	8
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim	MUARA ENIM	6.763,91	633.779	22	12
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Empat Lawang	EMPAT LAWANG	2.234,10	342.178	10	5
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten OKU Selatan	OKU SELATAN	3.412,72	424.190	19	5
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten OKU	OKU	3.774,50	379.130	13	13

Sumber: Dokumen Bidang Pemetaan Kebakaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Berdasarkan data Tabel 1 luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten OKI memiliki luas wilayah terbesar dengan (17.071,33 km²) dengan jumlah penduduknya 797.429 jiwa. Sedangkan Kota Palembang memiliki luas wilayah terkecil (352,51 km²) namun jumlah penduduknya paling besar, yaitu 1.706.371 jiwa. Ini mengindikasikan Ibu kota Provinsi memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi di Sumatera Selatan.

Jumlah Kecamatan dan Pos Pemadam Kebakaran, Kabupaten Lahat memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan, tetapi hanya memiliki 3 pos pemadam kebakaran. Kabupaten OKU memiliki jumlah pos pemadam kebakaran terbanyak, yaitu 13 pos pemadam, hal ini cukup relevan dengan jumlah kecamatan yang dimiliki Kabupaten OKU yaitu 13 Kecamatan sedangkan Kabupaten Muara Enim menduduki jumlah pos pemadam kedua dengan 22 jumlah Kecamatan dan memiliki 12 Pos pemadam. Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 9 pos pemadam kebakaran, yang menunjukkan upaya yang baik dalam penyediaan layanan pemadam kebakaran. Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.550,79 km² dan penduduk 644.386 jiwa memiliki 8 pos pemadam kebakaran, menunjukkan rasio yang relatif baik antara jumlah pos dan luas wilayah serta jumlah penduduk.. Kabupaten Empat Lawang memiliki rasio yang relatif lebih rendah dengan luas wilayah 2.234,10 km² dan jumlah penduduk 342.178 jiwa, tetapi hanya memiliki 5 pos pemadam kebakaran.

Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin menunjukkan kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah pos pemadam kebakaran yang relatif banyak, yang merupakan hal positif. Beberapa daerah seperti Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKI, meskipun memiliki luas wilayah yang besar dan jumlah kecamatan yang banyak, hanya memiliki sedikit pos pemadam kebakaran. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk penambahan pos pemadam kebakaran di masa depan. Daerah dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang relatif sedikit mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penempatan pos pemadam kebakaran, misalnya, dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan waktu tanggap darurat.

Penelitian sebelumnya telah membahas strategi penguatan kelembagaan dalam berbagai konteks, namun masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal

praktik konsensus yang dapat diadaptasi untuk membangun ketahanan bencana melalui pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang (Tadele & Manyena, 2009) mengenai tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal masih terbatas (Seng, 2013) (Arifin, 2021) (Nilawati, 2022) (Wahyuningrum et al., 2023). Selain itu, analisis implementasi dan efektivitas dari praktik-praktik tersebut juga belum banyak dikaji. (Nilawati, 2022) (Wahyuningrum et al., 2023) (Muryani, 2020) (Muryani, 2020) (Nilawati, 2022) (Ma'ruf & Isbandono, 2017) (Wahyuningrum et al., 2023).

Pengelolaan bencana berbasis komunitas (PBBK) telah diakui dalam pengurangan risiko bencana, namun dalam implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindihnya pengelolaan, kurangnya pembinaan untuk keberlanjutan, dan pendanaan yang tidak memadai (Muryani, 2020). Tata kelola penanggulangan bencana yang melibatkan kolaborasi antar-daerah (*intergovernmental*) juga merupakan aspek penting yang belum banyak dikaji, sementara koordinasi dan sinergitas lintas pemerintah daerah merupakan hal krusial dalam menghadapi bencana yang berskala regional (Muryani, 2020) (Ma'ruf & Isbandono, 2017) (Muryani, 2020) (Ma'ruf & Isbandono, 2017). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dalam pengembangan penguatan kelembagaan tanggap darurat bencana yang melibatkan partisipasi multipihak, serta menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. (Suhendri & Purnomo, 2017) (Harsanto et al., n.d).

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Belum optimalnya sarana dan prasana penyelenggara Sub Urusan Kebakaran
 - a. Masih kurangnya sebaran pos pemadam kebakaran di 16 kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan hanya 1 kabupaten yang memiliki jumlah pos pemadam kebakaran yang setiap kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - b. Terdapat 5 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Unit Pemadam Kebakaran yang sangat terbatas yaitu Kabupaten OKI, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan OI.

- c. Perlengkapan peralatan pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota masih terbatas

Masih terbatasnya sarana dan prasarana Sub Urusan Kebakaran pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen kritis dalam upaya penanggulangan kebakaran, keterbatasan fasilitas ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kemampuan penanggulangan kebakaran di berbagai daerah, menyebabkan respon yang lambat dan tidak efektif saat terjadi insiden kebakaran.

2. Masih lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

- a. Masih Banyak yang Belum Bersertifikasi dan Kompeten pada bidangnya.

Kompetensi dan sertifikasi SDM adalah aspek penting dalam memastikan bahwa tenaga pemadam kebakaran mampu menjalankan tugasnya dengan profesional. Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan masih banyak petugas pemadam kebakaran yang belum tersertifikasi, mengakibatkan rendahnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan.

- b. Minim kualifikasi Jabatan fungsional dan ketidaksesuaian Pendidikan jabatan fungsional

Belum adanya spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian pada jabatan fungsional analis kebakaran dan masih sangat sedikitnya SDM damkar yang menduduki jabatan fungsional analis kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 17 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional analis kebakaran.

Spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian sangat penting dalam membentuk SDM yang kompeten. Dinas Pemadam kebakaran Kabuapten/kota di Sumatera Selatan, belum ada program pendidikan yang spesifik untuk jabatan analis kebakaran, yang menyebabkan kurangnya SDM dengan keahlian khusus dalam bidang ini.

- c. Keterbatasan Pengembangan Keterampilan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2019 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah, pelatihan dan pengembangan keterampilan adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas SDM. Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten/kota di Sumatera Selatan, keterbatasan anggaran dan fasilitas menghambat pelaksanaan pelatihan yang efektif bagi petugas pemadam kebakaran.

- d. Masih adanya kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang belum memiliki Relawan Kebakaran

Masih Adanya Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang Belum Memiliki Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Sesuai dengan Kepmendagri No. 364.1-306 Tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran untuk mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) merupakan elemen pendukung yang vital dalam penanggulangan kebakaran, masih banyak Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan yang belum memiliki Redkar, berdasarkan table 4 data Relawan pemadam kebakaran tahun 2023 terdapat 8 dari 18 OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran yang belum memiliki Redkar yang mengakibatkan kurangnya dukungan dalam penanggulangan kebakaran. Kemandirian Instansi Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran di Sumatera Selatan hanya terealisasi 50%.

Dari 17 Kabupaten/Kota dan 1 OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran di Sumatera Selatan, Masih Terdapat 9 Kabupaten/Kota atau 50% dari total 18 OPD yang belum menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mandiri Sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

3. Masih lemahnya regulasi Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran:
 - a. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Berdasarkan Permen PU No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, RISPCK adalah dokumen strategis yang penting untuk penanggulangan kebakaran secara komprehensif. RISPCK memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pencegahan, mitigasi, dan respons kebakaran. Semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki RISPCK, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan efektivitas dalam upaya proteksi kebakaran.

- b. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum terpenuhi.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam Kebakaran Respon Time 15 Menit Masih Banyak yang Belum Terpenuhi di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah acuan penting dalam menilai kinerja layanan publik. Menurut teori manajemen kualitas pelayanan, pemenuhan SPM menunjukkan efektivitas dan efisiensi layanan. Banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi SPM respon time 15 menit, disebabkan oleh keterbatasan pos pemadam kebakaran dan jumlah personil yang tidak mencukupi, hingga sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.

- c. Belum Adanya Standar Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk memastikan keseragaman dan efisiensi dalam penanganan kebakaran. Dinas Pemadam kebakaran Kabuapten/kota di Sumatera Selatan, belum ada SOP yang terstandarisasi berdasarkan masing-masing OPD, mengakibatkan variasi dalam prosedur dan potensi kesalahan dalam penanganan kebakaran.

Dari 18 OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran, peneliti memilih lokus penelitian pada 3 OPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Provinsi

Sumatera Selatan, Kota Palembang dan Kota Prabumulih, Adapun alasan yang melatarbelakangi pemilihan 3 OPD tersebut yaitu:

- a. Provinsi Sumatera Selatan merupakan OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran yang masih bergabung dengan OPD lain atau belum mandiri yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Selatan, memiliki jumlah SDM yang terdiri dari PNS dan Non-ASN berjumlah 36 orang, dari aspek sarana dan prasarana memiliki jumlah unit pemadam kebakaran terbanyak berjumlah 2 unit firetruck, 2 unit rescue, dan 4 unit R2 APAR dan memiliki 1 Pos Pemadam Kebakaran.
- b. Kota Palembang merupakan OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran yang sudah mandiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palembang, memiliki jumlah SDM yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Non-ASN tertinggi berjumlah 633 orang, dari aspek sarana dan prasarana memiliki jumlah unit pemadam kebakaran terbanyak berjumlah 32 unit dengan jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 9 Pos Pemadam Kebakaran, namun jumlah kejadian kebakaran tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 440 Kejadian.
- c. Kota Prabumulih merupakan OPD Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran yang masih bergabung dengan OPD lain atau belum mandiri yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih, memiliki jumlah SDM yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Non-ASN berjumlah 106 orang, pada aspek sarana dan prasarana hanya memiliki 4 unit pemadam kebakaran serta 1 pos pemadam kebakaran, dan kejadian kebakaran tertinggi ketiga di Sumatera Selatan.

Pemilihan OPD di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih sebagai lokus utama penelitian dianggap telah mewakili 18 OPD penyelenggara sub urusan kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan, dengan representasi yang seimbang antara daerah dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda, yakni yang sudah mandiri dan yang masih bergabung, serta variasi dalam jumlah sumber daya dan tingkat kejadian kebakaran. Pemilihan lokus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perbedaan kelembagaan, SDM, dan infrastruktur kebakaran, serta

menghasilkan rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan.

Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di berbagai kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam kesiapan dan kapasitasnya. Beberapa daerah mungkin memerlukan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran, baik dalam hal sumber daya manusia, peralatan, maupun prosedur operasional. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang memerlukan respon cepat dan tepat. Distribusi pos pemadam kebakaran yang tidak merata dan kurangnya fasilitas di beberapa daerah dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui penguatan kelembagaan. Pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada respon darurat tetapi juga pada upaya pencegahan yang efektif. Kelembagaan yang kuat dapat melakukan edukasi masyarakat, inspeksi rutin, dan implementasi regulasi yang ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan ”. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konkret dan implementatif untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Penguatan kelembagaan akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak negatif dari kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

- a. Sebagai referensi perumusan kebijakan bagi Pemerintah dalam Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya terkait penguatan kelembagaan, dan sebagai perbandingan dan pengembangan penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. Z. (2021). Simulasi Dampak Penghalang pada Gelombang Tsunami Menggunakan Persamaan Air Dangkal dengan Metode Beda Hingga. *Jambura Journal of Mathematics*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.34312/jjom.v3i2.10068>
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fauzi, F., & Jatiningrum, C. (2021b). Strengthening institutions theory on modification of technology acceptance model: A study of financial information system for local government. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.31328/jsed.v4i1.2254>
- Haeruddin, M. I. M. (2024b). The Influence of Organisational Culture on the Institutional Strengthening through a Resource-Based View. *Asian Journal of Economics Business and Accounting*, 24(7), 129–134. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i71397>
- Harsanto, B. T., Rosyadi, S., Wahyuningrat, W., & Simin, S. (2017b). Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 30(2), 188. <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i22017.188-196>
- Hidayat, R. (2022). Institutional Strengthening and Capacity Building: A Case Study in Indonesia. *Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1), 50-65. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.209>
- Horton, A. J., Lehtinen, J., & Kumm, M. (2022). Targeted land management strategies could halve peatland fire occurrences in Central Kalimantan, Indonesia. *Communications Earth & Environment*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/s43247-022-00534-2>
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juliafad, E., & Andayono, T. (2021). Study on building permit awareness in West Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 708(1), 012093. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/708/1/012093>
- Kodur, V., Kumar, P., & Rafi, M. M. (2019). Fire hazard in buildings: review, assessment and strategies for improving fire safety. *PSU Research Review*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.1108/prr-12-2018-0033>

- Listiana, I., Mutolib, A., Bursan, R., Yanfika, H., Widyastuti, R. a. D., & Rahmat, A. (2021b). Institutional strengthening of farmer group to support sustainable agriculture and food security in Pesawaran regency. *Journal of Physics Conference Series*, 1796(1), 012028. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1796/1/012028>
- Maharani, V. N., Novrikasari, N., Andarini, D., Camelia, A., & Fujianti, P. (2022). Analysis of Life-Saving Facilities System and Fire Management Facilities at Ogan Ilir Police Station in 2020. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 11(3), 463–472. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v11i3.2022.463-472>
- Ma'ruf, M. F., & Isbandono, P. (2017). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam Di Daerah. *Jpsi (journal of public sector innovations)*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54>
- Mulyani, Y., Mahfud, T., Winnarko, H., Gafur, A., Rustika, R., & Nurdin, I. (2021c). Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pengurus Desa Wisata Teritip. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(1), 22–27. <https://doi.org/10.56190/jat.v1i1.5>
- Muryani, C. (2020). Community Based Disaster Management in Indonesia. *Social Humanities and Educational Studies (SHEs) Conference Series*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/shes.v3i1.45158>
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori. http://digilib.fisip.undip.ac.id/index.php?p=show_detail&id=38489&keywords=
- Nawi, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Pleno jure*, 4(5), 42–55. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v4i5.25>
- Nilawati, E. (2022). Tata Kelola Kolaboratif Manajemen Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul (Collaborative Governance Covid-19 Pandemic Disaster Emergency Response Management In Gunungkidul Regency). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19(1), 64–77. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.845>
- Nugroho, S. P. 2010. “Karakteristik Bencana Gagal Teknologi di Indonesia,” *Dialog Penanggulangan Bencana*, 1. Tersedia pada: <http://perpustakaan.bnppb.go.id/index.php?p=fstreampdf&fid=106&bid=889>.

- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyan Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Perilla, F. S., Villanueva, G. R., Cacanindin, N. M., & Palaoag, T. D. (2018). Fire Safety and Alert System Using Arduino Sensors with IoT Integration. <https://doi.org/10.1145/3185089.3185121>
- Poespito Hadi, W., Zauhar, S., Haryono, B. S., & Amin, F. (2021b). Institutional Strengthening and Capacity Building: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 8(3), 629–635. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0629>
- Qurniati, R., Duryat, D., & Kaskoyo, H. (2018). Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar gunung rajabasa lampung. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 80–86. <http://jss.lppm.unila.ac.id/index.php/ojs/article/download/26/22>
- Raharja, S., Marimin, N., Machfud, N., Papilo, P., Safriyana, N., Massijaya, M. Y., Asrol, M., & Darmawan, M. A. (2020b). Institutional strengthening model of oil palm independent smallholder in Riau and Jambi Provinces, Indonesia. *Heliyon*, 6(5), e03875. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03875>
- Raharjo, P., Nenobais, H., Budiharjo, B., Sumartono, T, Rusmiati, E., & Febriyanti, N. P. D. (2022). Strengthening Institutional Capacity Of Kelurahan Following The Implementation Of Law No. 23 / 2014 about local government. *iccd*, 4(1), 108-113. <https://doi.org/10.33068/iccd.v4i1.449>
- S. A. H. Sagala, P. Adhitama, D. G. Sianturi, and U. Al Faruq, "Mitigation Scenarios For Residential Fires In Densely Populated Urban Settlements In Sukahaji Village, Bandung City," *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, vol. 3, no. 2, pp. 147-160, Oct. 2016. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.3.2.147-160>
- Saputro, D. N., & Rahmawati, E. (2022). Fire Risk Analysis and Evaluation of Rescue Facilities in the Engineering Laboratory Building. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220207.046>
- Sari, N. F. a. B. (2019). Smart Response Concept for Fire Emergency Response in Surabaya City. *International Journal of Engineering Research And*, V8(07). <https://doi.org/10.17577/ijertv8is070293>

- Seng, D. S. C. (2013). Tsunami resilience: Multi-level institutional arrangements, architectures and system of governance for disaster risk preparedness in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 29, 57–70. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.12.009>
- Silalahi, U. (2021). Strengthening Institutions: Theory on Modernization. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 345-360. <https://doi.org/10.22146/jsp.62039>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendri, S., & Purnomo, E. P. (2017b). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174–204. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4175>
- Syaufina, L. (2018). Forest and Land Fires in Indonesia: Assessment and Mitigation. In Elsevier eBooks (pp. 109–121). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-812056-9.00008-7>
- Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. *Nature Climate Change*, 6(7), 640–643. <https://doi.org/10.1038/nclimate3008>
- Tadele, F., & Manyena, S. B. (2009). Building disaster resilience through capacity building in Ethiopia. *Disaster Prevention and Management an International Journal*, 18(3), 317–326. <https://doi.org/10.1108/09653560910965664>
- Thompson, M. R. (2003). The Three Rs of Fire Safety, Emergency Action, and Fire Prevention Planning: Promoting Safety at the Worksite. *Workplace Health & Safety*, 51(4), 169–179. <https://doi.org/10.1177/216507990305100407>
- Wahyuni, I., Ismail, N., & Izziah, I. (2020). Hospital fire safety improvement effort (study case Rumah Sakit Ibu dan Anak, Banda Aceh). *IOP Conference Series Materials Science and Engineering*, 933(1), 012058. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/933/1/012058>
- Wahyuningrum, D., Alfiani, O. D., & Srinarbita, A. (2023). Pemanfaatan Informasi Geospasial Untuk Manajemen Bencana. *Jurnal Ilmiah Geologi PANGEA*, 9(1sp), 1. <https://doi.org/10.31315/jigp.v9i1sp.9403>
- Wirazilmustaan, Robuwan, R., & Agustian, R. A. (2018). Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3229531>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota